

KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA DALAM MENANGAIKRISIS PENGUNGSIS DI UNI EROPA TAHUN 2014-2018

Oleh : Monika Dwijayanti
NIM:E1111161034

Elyta, Ori Fahriansyah
*Email : monikadwijayanti@student.untan.ac.id
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Hungaria Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Uni Eropa Tahun 2014-2018”. Pada tahun 2014 & 2015 jumlah pengungsi meningkat hal ini menyebabkan permasalahan diberbagai Negara Uni Eropa termasuk Hungaria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria untuk mencegah meningkatnya jumlah pengungsi ke Hungaria. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis, yakni mengumpulkan berbagai data serta informasi, adapun teori yang digunakan dalam menganalisis yakni menggunakan teori Secutizing Actor dan Referent Objek oleh Barry Buzan, Ole weaver dan Jaap De Wilde tahun 1998.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Hungaria benar telah menetapkan beberapa kebijakan untuk menolak pengungsi terutama pengungsi dari Timur Tengah dan beberapa Negara lainnya, adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Hungaria seperti menarik opini masyarakat Hungaria dengan menggunakan opsi kuisisioner, mengamandemen undang-undang baru tentang pengungsi, pembangunan pagar berduri, memasang billboard dijalanan, dan menyiagakan Militer ataupun Polisi, hal ini dilakukan pemerintah Hungaria guna untuk menekan jumlah pengungsi memasuki negaranya.

Kata kunci: kebijakan Pemerintah Hungaria, Uni Eropa, Krisis Pengungsi

ABSTRACT

The title of this thesis is “Hungary Government Policy in Handling the Refugee Crisis in the European Union in 2014-2018”. In 2014 & 2015, the number of refugees was increasing which resulted in problems to various countries of the European Union, including Hungary. This study aimed to discover and to analyze the security policy from the Hungary Government in preventing the increasing number of refugees in Hungary. This research used a qualitative study method with an analytic approach. This study used Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap De Wilde’s Securitizing Actor and Referent Object theory from 1998.

The results showed that the Hungary Government had established some policies to refuse the refugees especially from the Middle East and some other countries. The policies were gathering opinion from the Hungarian using questionnaires, amending regulation on refugees, building spiked fences, installing billboards on the street, and alarming the Police and Military. These were done to press the number of refugees in their country.

Keywords: Hungary Government policy, European Union, Refugees Crisis

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, isu mengenai pengungsi, pencari suaka, dan migrasi bukanlah hal baru bagi negara-negara di belahan dunia termasuk di Uni Eropa. Pada saat ini Jalur lalu lintas antar negara yang mudah diakses baik melalui jalur darat, laut maupun udara semakin terbuka. Jalur darat, dalam hal ini dapat melalui Perbatasan suatu negara dinilai cukup baik untuk menjadi jalur transit untuk para pengungsi ataupun para imigran dari negara-negara yang lain. Dalam hal ini masyarakat atau orang-orang tersebut akan meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya semula untuk mencari keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. Mereka meninggalkan negara asalnya karena adanya peperangan yang menyebabkan konflik, peperangan, kejahatan/kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencari negara baru untuk tempat tinggal mereka sehingga mereka dapat melangsungkan hidup dengan damai tanpa adanya konflik dan lainnya dalam jangka waktu yang panjang. (www.uhm.ic.id diakses pada tanggal 22 januari 2019).

Definisi Pengungsi, Pengungsi merupakan sekelompok orang atau seseorang yang pergi untuk meninggalkan wilayahnya guna untuk menghindari suatu bencana

atau musibah. Baik bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor atau kebakaran, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti, peperangan serta konflik antar Negara, seperti saat ini yang sedang terjadi, Para pengungsi tersebut merasa takut oleh kelompok tertentu serta sikap otoriter para pemimpinnya serta kelaparan juga menjadi faktor untuk mereka pergi sehingga hal ini membuat mereka terpaksa perbindah-pindah, serta meninggalkan negara mereka karena takut akan terganggu keselamatannya yang diakibatkan karena perbedaan dari suku, agama, kewarganegaraanya atau politik tertentu. (Namira, 2014).

Karena mereka merasa tidak mampu dan tidak memperoleh perlindungan dari negaranya maka mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang aman dengan cara menjadi pengungsi di Uni Eropa. Ketika para pengungsi memilih pergi meninggalkan Negara asalnya, sebagian dari mereka akan meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaan dan hal lainnya. ketika para pengungsi tersebut pergi mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Isu migrasi tentang pengungsi bukanlah hal baru bagi Negara Uni Eropa, seperti Negara Hungaria yang memiliki sejarah dalam melakukan kebbaikannya untuk membantu pengungsi dari berbagai Negara asal. (Namira, 2014)

Dimulainya dari perubahan tersebut adalah Hungaria menjadi negara transit dan menjadi tujuan pengungsi. Tujuan pengungsi tersebut terjadi adanya perubahan baik bidang social ataupun politik seperti yang terjadi pada tahun 1990 di Eropa bagian Timur. ketika transisi ke demokrasi tersebut, pembentukan konstitusi juga membentuk suatu sistem administratif untuk menanggulangi migrasi. Seperti yang terdapat pada *Constitution reform act xxxi of 1989* yang membagikan hak migrasi untuk warga Hungaria yang di iringi dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat negri asing maupun yang ada di wilayah perbatasan. (www.uhm.ic.id diakses pada tanggal 22 januari 2019).

Pada tahun 1989 pada konteks pengungsi yang di tandainya dengan penandatanganan kesepakatan Jenewa perihal pengungsi tahun 1951, protokonya tahun 1961 oleh Hungaria tanggal 14 Maret 1989. Pada saat itu Hungaria hanya menerima pengungsi dari kawasan Uni Eropa. Pada tahun 1989 akibat Balkan war Yugoslavia, Serbia dan Albania yang diikuti dengan kehadiran 40.000 orang imigran yang sah tahun 1990 di Hungaria. Pada saat itu penerimaan terbuka lebar serta mayoritas yang datang dari Eropa Timur.

Pembatasan tentang geografis tentang

Monika dwijayanti E1111161034
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan

kesepakatan Jenewa 1951 atas penerimaan pengungsi dihapuskan, dan itu maksudnya Hungaria bisa menerima pengungsi dari luar Uni Eropa. Pada tahun 2004 Hungaria memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa, Hungaria berupaya untuk menyelaraskan kebijakan migrasinya dengan syarat Uni Eropa yakni dengan mengadaptasi syarat migrasi Uni Eropa policy yang tercantum pada *UE asylum* kebijakan domestic Hungaria. Menurut data Eurostat, pada tahun 2015 Hungaria memiliki jumlah tertinggi yaitu 17.699 pengungsi. Dalam rentang tahun 2014 jumlahnya 41.400 orang, 2015 174.345 orang 2016 (944.64) orang 2017, (101.117) dan 2018 1,8 jt jiwa, Sebanyak 3,23% permohonan sukaka di Uni Eropa mencapai 13,9%. Permohonan sukaka tersebut didominasi dari Suriah sekitar 64.080 orang, Afganistas 45.560, dan Kosovo 23.6

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi Timur Tengah ya

Tahun	Jumlah	Negara
4	080 Jiwa	iah
5	560 Jiwa	ganistan
6	690 Jiwa	sovo

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

[http://www.transformnetwork.net/blog/blog-](http://www.transformnetwork.net/blog/blog-2015/news/detail/Blog/refugee-crisis-)

[g- 2015/news/detail/Blog/refugee-crisis-](http://www.transformnetwork.net/blog/blog-2015/news/detail/Blog/refugee-crisis-)

Sejak tahun 2011 konflik yang berada

di kawasan Timur Tengah menjadi Salah satu peristiwa yang menyebabkan para pengungsi berdatangan ke kawasan Uni Eropa peristiwa tersebut ialah *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah. *Arab Spring* merupakan suatu proses demokratisasi negara-negara otoriter di Timur Tengah. Dalam konflik *Arab Spring* tersebut, banyak terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum human internasional yang terjadi di negara-negara yang mengalami konflik tersebut.

Salah satu Negara yang mengalami konflik adalah Suriah. Pelanggaran yang terjadi di Suriah mulai dari adanya penyerangan terhadap fasilitas umum dan penduduk sipil, penggunaan senjata kimia yang memiliki efek untuk mematikan. Selain konflik di Suriah konflik ini juga terjadi di Negara Yaman, konflik di Libya dan Tunisia dan yang juga membuat keadaan Timur Tengah dan Afrika semakin memanas. Situasi yang saat ini tidak kondusif hal ini tentunya membuat sebagian penduduk dari negara-negara tersebut memutuskan untuk pergi mencari tempat atau wilayah yang aman serta jauh dari adanya konflik, Seperti wilayah Eropa. Wilayah Eropa sendiri menjadi tujuan bagi para pengungsi dalam mencari perlindungan serta keselamatan yang dianggapnya lebih aman dibandingkan dengan Negara

asalnya yang dengan tujuan dapat melanjutkan keberlangsungan hidup kembali dengan lebih baik lagi, aman dan tentram tanpa adanya konflik. Negara-negara yang menjadi tujuan mereka yaitu kawasan Eropa yang dimana sebelumnya mereka dapat menampung para pencari suaka ataupun pengungsi. (www.blogs.loc.gov diakses pada tanggal 21 Februari 2019).

Dalam keterkaitan ini *United Nationas High Comissioner For Refugges* (UNCHR) menyebutkan bahwa ada kurang lebih 200.000 ribu pengungsi mencoba memasuki Eropa melalui wilayah bahari dengan Menggunakan kapal-kapal kecil untuk mereka pergi. Para pengungsi tersebut tidak memiliki pilihan selain menggunakan kapal-kapal kecil yang memiliki resiko yang besar dengan melawan arus laut serta ganasnya lautan dengan tujuan supaya mereka mendapatkan tempat yang aman untuk mereka tinggal dan mendapat perlindungan, sehingga mereka memilih kawasan Eropa sebagai tempat teraman menurut mereka. (Nadia,2018).

Namun pada kenyataanya ribuan pengungsi yang berusaha untuk memasuki kawasan Eropa menjadi perhatian dunia internasiaonal karena dalam hal ini mereka harus mendapat situasi yang

mengerikan para pengungsi ini harus menghadapi rintangan yang besar dimana mereka harus kehilangan nyawa, keluarga maupun kerabat sebelum sampai ke negara-negara tujuannya yaitu Uni Eropa. (www.blogs.loc.gov diakses pada tanggal 21 Februari 2019).

Banyak terjadi peristiwa selama mereka mengarungi laut tengah seperti halnya kapal tenggelam, kapal karam ataupun kedinginan serta kelaparan yang menyebabkan pengungsi tewas saat menuju Eropa. Saat mereka tiba dikawasan Eropa mereka tidak langsung menikmati kelangsungan hidup layak seperti yang mereka harapkan melainkan pengungsi menerima perlakuan yang tidak baik dari negara seperti Yunani, Serbia ataupun Hungaria. Masuknya pengungsi ke Eropa secara besar-besaran mendapat berbagai macam tanggapan dari negara-negara kawasan Eropa tersebut. (Priono, 1999)

Ada 28 negara yang memiliki peraturan mengenai pengungsi serta berbeda dalam penerimaan atau perlakuan dari satu negara dengan negara lainya berbeda-beda. Namun Negara seperti Jerman, Italia, serta Prancis justru siap untuk menampung pengungsi ke negaranya. (Aziza, 2017). Mereka dikenal cukup ramah dan baik dalam memperlakukan para pengungsi tersebut. Sehingga hal tersebut menjadikan negara-

negara tersebut menjadi salah satu tujuan para pengungsi.

Hungaria merupakan salah satu negara transit atau Negara yang akan digunakan untuk menuju Eropa lainya jalan yang akan digunakan untuk menuju Jerman yang merupakan harapan untuk pengungsi yang berasal dari Negara lain saat mereka akan bepergian ke beberapa negara seperti Jerman, Italia atau negara lainya di Eropa. Namun justru sebaliknya Hungaria menolak para pengungsi tersebut dan hal tersebut membuat para pengungsi merasa kesulitan untuk memasuki wilayah Hungaria. Para pengungsi ini diperlakukan kurang layak, baik dari segi pelayanan kesehatan, makanan, kekerasan secara psikologis, serta penutupan perbatasan antar Negara yang harus diterima para pengungsi tersebut. (Silviana, 2000).

Gambar 1.1

Peta Negara Hungaria



Sumber: <http://transformnetwork2015/news/>

refugee-crisis-and-hungary.html

Secara geografis Hungaria merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Austria di barat, Serbia, Kroasia, serta Slovenia di selatan serta barat daya, Romania di tenggara, Ukraina ditimur laut serta Slowakia di utara. Hungaria yang berdekatan dengan Austria, dimana Austria sangat dekat dengan Jerman, maka banyak pengungsi yang menganggap bahwa Hungaria adalah negara yang strategis, baik jika dijadikan sebagai tempat mengungsi maupun sebagai negara transit untuk ke Negara-negara Eropa Barat lainnya. Hal ini semakin diperjelas dengan rute yang ditempuh oleh pengungsi dari Timur Tengah menuju Eropa.(Aziza, 2017).

Pengungsi yang akan ke Eropa menuju Turki, kemudian ke Yunani, menuju Serbia, hingga akhirnya menuju tujuan terakhirnya yaitu Hungaria. Hungaria juga memiliki sejarah dalam menampung pengungsi pada masa Perang Balkan. Namun jumlahnya kalah besar dengan jumlah pengungsi yang datang dari Negara-negara berkonflik seperti Timur tengah, Afrika, dan Asia. Pada tahun 2014 Hungaria menerima pengungsi paling banyak yaitu sebanyak 41.400

permohonan suaka pada tahun 2015 mencapai 174.435 jumlah permohonan suaka di Hungaria tersebut naik menjadi 3,23% pada 2018. Uni Eropa sedang memiliki permasalahan krisis pengungsi yang ditandainya dengan besarnya gelombang pengungsi yang tiba di Eropa karena terjadinya konflik. Pengungsi yang tiba di Eropa karna konflik sekitar 1,3 juta orang pengungsi pada tahun yang sama Jerman menerima sebanyak 442.000 permohonan suaka.

Tahun 2016 UNCHR mencatat 362.753 pengungsi telah tiba di Eropa dan sebanyak 101.117 tahun 2017 para pengungsi tiba ke Eropa. Dengan adanya pengungsi yang akan menuju Eropa, tidak semua Negara disana mau menampung mereka, hanya ada beberapa Negara. Dalam masalah yang terpaut dengan pengungsi Uni Eropa sudah mempunyai peraturan tentang suaka serta pengungsi yang ada di dalam Treaty Of Lisbon yakni pasal 78 ayat 1 yang menyatakan :”Serikat pekerja akan mengembangkan kebijakan bersama tentang suaka, perlindungan sementara dengan maksud untuk menawarkan status yang pantas bagi setiap warga negara ketika yang membutuhkan perlindungan internasional dan memastikan kepatuhan dengan prinsip non-refoulement, Kebijakan ini tidak sama dengan perjanjian Jenewa pada 28 Juli

1951 dan protokol 31 Januari 1967 yang terkait dengan keadaan tempat perlindungan dan perjanjian terkait lainnya". Yang dimana ini melaporkan kalau Uni Eropa wajib mematuhi prinsip non-refoulement dan konvensi 1951 dan tahun 1967 tentang status pengungsi dan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi para pengungsi. (Aziza, 2000).

Namun Setiap negara-negara Uni Eropa memiliki cara pandang masing-masing yang mengagap adanya positif maupun negatif, namun Eropa telah membentuk kebijakan sistem khusus yang mengatur mengenai pengungsi tersebut atau disebut CEAS. (*Common European Asylum System*) Per Maret 2018 pengungsi yang menuju Eropa semakin meningkat sekitar 13,1 juta. (Riasillviana, 2017). Dengan adanya peningkatan para pengungsi yang datang ke Eropa pemerintah Hungaria akhirnya mengeluarkan Kebijakan untuk menekan jumlah pengungsi, Hungaria dalam menangani krisis pengungsi tersebut mengeluarkan kebijakan sekuritisasi untuk keamanan negaranya dengan cara membangun pagar berduri disepanjang perbatasan Kroasia. Hungaria menutup perbatasannya dengan Kroasia dengan membangun pagar berduri disepanjang perbatasan itu guna untuk membendung

laju arus ribuan pengungsi yang setiap hari berdatangan ke Hungaria sebelum akhirnya para pengungsi ini akan melanjutkan perjalanan ke negara Eropa bagian utara atau menetap di Hungaria. Dalam hal ini Menteri Luar Negri Hungaria Peter Szijjarto mengeluarkan pengumuman setelah rapat dengan kabinet keamanan nasional. Akibat penutupan perbatasan ini Kroasia menyatakan akan mengalihkan laju pengungsi ke Slovenia. (www.brain.org, diakses pada Tanggal 22 Desember 2019).

Menteri dalam negeri Kroasia, Ränge Ostojic mengaku bahwa kebijakan yang diambilnya telah sepakat dengan Slovenia. Menteri luar negeri Slovenia juga menanggapi Slovenia, vesna Gjorkos Znidar akan tetapi menerima pengungsi selama Austria dan Jerman tetap membuka perbatasan mereka. Menteri dalam negeri Hungaria mengatakan telah memberitahu Negara-negara yang berbatasan dengan Hungaria mengenai keputusannya tersebut tentang pembangunan kawat berduri.

Selain menutup perbatasan dengan Kroasia, Hungaria juga menutup wilayah perbatasan dengan Serbia dengan cara yang sama yakni membangun pagar berduri disepanjang perbatasan dengan tujuan yang sama, serta akan melakukan tindak pidana selama satu tahun jika ada

masyarakat Hungaria yang membantu para pengungsi masuk ke wilayah Hungaria dan membangun pusat penahan pengungsi dan, menghasilkan undang-undang baru yang berisi kumpulan ketentuan yang secara tidak langsung membatasi masuknya para pengungsi ke daerah Hungaria, selain itu juga Hungaria telah menyiagakan militer mereka untuk ditempatkan di wilayah perbatasan mereka. (www.dhs.gov Diakses pada tanggal 23 September 2019).

Kedatangan para pengungsi dari Timur Tengah termasuk Suriah menimbulkan gejolak politik ditengah masyarakat serta adanya dana tambahan pendanaan kampanye anti imigran serta pidato-pidato anti-imigran oleh pemerintah yaitu Perdana Menteri Orban Viktor. Perdana Menteri tersebut menghimbau kepada para pengungsi supaya tidak datang ke Hungaria karena menurutnya itu merupakan ancaman bagi identitas dan budaya Kristen Eropa, serta pengamanan perbatasan Hungaria jadi opsi buat mengalami kenaikan arus pengungsi maupun pencari suaka, pada dikala itu pula Hungaria sedang mengejar Zero Refugee policy. Dari pernyataan tersebut kemudian diiringi dengan pergantian kebijakan imigrasi khususnya para pengungsi supaya tidak masuk ke wilayahnya. tidak hanya itu 2015 Hungaria pula sudah menuntaskan pembangunan pagar kawat di

selama perbatasan. (Diakses Cnn Indonesia pada tahun 2016). Dengan ditutupnya perbatasan Hungaria hal ini membuat pengungsi tidak dapat melewatinya. Dalam hal ini Hungaria memiliki alasan bahwa para pengungsi tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya aksi terorisme di Negeri tersebut. Bagi Perdana Menteri Hungaria Victor Orban, Hungaria

tidak mempunyai alibi untuk menerima tiap imigran ataupun pengungsi sebab keadaan ekonomi serta demografi hendak lebih baik tanpa imigran ataupun pengungsi. Krisis pengungsi Eropa bermula pada tahun 2014, berawal dari meningkatnya jumlah pengungsi yang mau mencari suaka di Eropa, Mayoritas pengungsi berasal dari wilayah dengan keadaan perpolitikan yang tidak normal semacam Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika serta negara-negara di Semenanjung Balkan. (Diakses, international sindonews, pada tahun 2015).

Pada bertepatan pada 20 April 2017 pengungsian mulai merambah Eropa dengan menggunakan jalan laut ataupun darat. Jalan darat yang dilalui pengungsi ialah dari Suriah mereka mengarah Yunani, setelah itu lewat Macedonian, Serbia, Hungaria setelah itu Austria serta

mengarah Jerman, Perancis serta Swedia. Pada awal mulanya Hungaria membuka jalan perbatasannya untuk pengungsi ataupun imigran dengan harapan para imigran ataupun pengungsi tersebut hendak terus melaksanakan ekspedisi lanjutan ke Negeri lain. Namun setelah itu Hungaria menutup perbatasannya dengan pagar kawat berduri

sebab Hungaria telah sangat kesulitan buat mengatur dalam menanggulangi para pengungsi tersebut. Tidak hanya Hungaria, Yunani pula tidak siap menerima pengungsi sehingga mereka mengambil Aksi sepihak sebab pengungsi apalagi untuk transit sekalipun membuat jalan pengungsi terus menjadi tidak terkontrol. Suasana ini setelah itu jadi permasalahan besar untuk Uni Eropa sebab wajib senantiasa menerima pengungsi namun sebagian negeri menolak kedatangan pengungsi sehingga banyak pengungsi yang secara ilegal masuk ke sebagian negeri buat mencari proteksi serta tempat untuk tinggal.

Bagi hasil survey yang dicoba oleh” Pew Research Center” buat 10 negeri anggota Uni Eropa pada tahun 2016, warga dari sebagian negeri semacam Hungaria, Italia serta Polandia merasa kalau terdapatnya pengungsi dari Suriah

jadi ancaman utama untuk mereka, perihal ini pula disebabkan oleh orientasi politik pada negara- negara tersebut. Demikian pula untuk pejabat pemerintah anti terhadap kebijakan penerimaan pengungsi berkomentar kalau pengungsi ialah ancaman untuk negeri mereka.(www. un. org, diakses pada 26 Januari 2020)

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi adalah sebuah teori yang lahir dari kelompok Copenhagen School seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde. Sekuritisasi dalam study Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai proses yang berhubungan dengan politik internasional yang ada didalam konsep Copenhagen School dan sebagian besarnya dipandang sebagai realisme politik konstruktif dalam pendekatannya terhadap keamanan internasional. Sekuritisasi ini diperkenalkan oleh “Copenhagen School” yaitu kelompok ilmuwan politik pada awal tahun 1990an. Barry Buzan dan Ole waever merupakan ilmuwan yang mencetuskan sekuritisasi tersebut. Dalam sekuritisasi, soal isu-isu keamanan merupakan hasil sebuah konstruksi, sekuritisasi ini lebih fokus kepada keamanan masyarakat yang ada didalam suatu Negara yang berdaulat.

Bagi teori sekuritisasi, anggapan tentang keamanan dan ancaman lebih bergantung pada gimana para aktor menguasai serta membentuk ancaman tersebut daripada keadaan sesungguhnya dari ancaman keamanantersebut. Dalam sekuritisasi, aktor yang berperan dalam membuat kebijakan dapat membuat rekayasa politik dengan mengaitkannya dengan kondisi krisis atau darurat, sehingga memungkinkan aktor tersebut untuk melanggar aturan yang ada. Seperti yang kita ketahui, ancaman keamanan suatu negara tidak hanya meliputi militer dan politik saja, namun juga ancaman keamanan ekonomi. Menurut Buzan, ancaman keamanan sosial adalah aspek yang paling menarik di antara aspek-aspek tersebut. Aspek ini memang sulit dipisahkan dari aspek politik. Dengan aspek sosial, kita dapat melihat identitas dan keseimbangan di dalam suatu negara. (Buzan, 1998 : 24).

- a. Masalah keamanan nasional itu sendiri justru menjadi masalah keamanan sistematis dimana Negara bagian dan semua sistem memainkan perannya, dimana faktor ekonomi, politik, militer dan lingkungan juga ikut serta memainkan peran pentingnya. Buzan sendiri memperluas dari berbagai

aspek-aspek seperti keamanan regional, keamanan masyarakat serta keamanan World Order Interest, ialah kepentingan dunia dengan terdapatnya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik serta ekonomi internasional sehingga sesuatu Negeri bisa merasakannya. **Referent Object**

Referent Object merupakan sesuatu objek yang kategorikan baik Negeri ataupun warga yang ditatap secara eksistensial terancam serta wajib diamankan, dalam kaitanya dengan Hungaria Suatu yang ditatap secara nyata terancam serta memiliki tuntutan formal buat bertahan. Bersumber pada pemikiran tradisional yang jadi referent object ini umumnya merupakan negeri maupun bangsa. Untuk negeri yang jadi referent object merupakan kedaulatan, untuk bangsa merupakan bukti diri. Tetapi referent object dikala ini tidak cuma sebatas negeri maupun bangsa saja, melainkan bermacam spektrum memungkinkan buat jadi referent object. Pada hakekatnya, aktor yang menimbulkan isu keamanan dapat saja membangun seluruh suatu selaku suatu referent object. Aspek yang nantinya hendak pengaruhi sukses ataupun tidaknya suatu isu jadi isu keamanan merupakan perbandingan keahlian aktor dalam mengagendakan isu

bersangkutan.

B. Securitizing Actor

Securitizing Actor merupakan seseorang maupun segerombolan kelompok yang melaksanakan speech-act serta berupaya membentuk suatu data berganti sebagai isu keamanan, actor sekuritisasi sanggup saja berasal dari birokrat, pemerintah, pimpinan politik, pelobi, serta, kelompok-kelompok penekan.

2. Keamanan Nasional

Konsep keamanan mulai mengalami perubahan dari masa ke masa dan menjadi sebuah konsep yang interpretative. Keamanan itu sendiri selama ini hanya berlaku kepada hal-hal yang berkaitan dengan power, perang dan militer tetapi membuka juga terhadap konsep yang meluas seperti di sector politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Actor keamanan itu sendiri ialah Negara, kemudian dikembangkan ke individu, kelompok, lingkungan hidup dan keberlangsungan tersebut. (Buzan, 1991).

Keamanan nasional bisa dimaksud selaku keahlian Negara untuk melindungi dirinya dari bahaya dan ancaman yang berasal dari luar. Tujuannya dari keamanan sebuah Negara adalah mencegah serta mengilangkan resiko serangan terhadap Negara dan populasinya. Menurut

Kusnanto Anggoro dalam bukunya berjudul kewan nasional, pertahanan nasional dan ketertiban umum didefinisikan kewan nasional dengan menjelaskan kewan secara umum. Dalam konsep tradisional, biasanya para ilmuwan menafsirkan kewan yang bersifat sederhana bebas dari segala macam bentuk ancaman bahaya, ketakutan atau cemas sebagai kondisi ancaman fisik yang berasal dari luar.

Definisi keamanan sangat dipengaruhi oleh ideology. Untuk kalangan realis keamanan dimaksud selaku upaya untuk mempertahankan daerah kedaulatan buat memproteksi terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam negeri. Dalam perspektif realis suatu Negara hendak mengejar power, perihal ini disebabkan oleh power untuk mempunyai korelasi dengan keamanan negaranya. Negara akan membangun kemampuan militer secara Offensive untuk menjaga dirinya untuk tetap bertahan. (Baylis & Smith, 2001).

Bagi Buzan ekspansi suatu jadwal yang tidak hanya menempatkan Negara sebagai salah satunya referent object, namun terdapat sebagian sector (Buzan, 2001) antara lain merupakan :

1. Political security, lebih memfokuskan pada organisasi stabilitas negeri, system

pemerintahan dan ideology terhadap pemerintah Dalam political security pemerintah Hungaria mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengamandemen undang-undang baru dan membuat kuisisioner untuk mengiring opini public masyarakat Hungaria untuk menolak adanya tentang pengungsi.

2. Military security, memfokuskan pada perihal yang saling mempengaruhi ialah kapabilitas militer antar yang bersifat offensive serta deensive. Dalam millitay security Hungaria mengerahkan sejumlah personel militer dan polisi untuk menjaga wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut untuk mencegah meningkatnya jumlah pengungsi melalui perbatasan.
3. Societal security, memfokuskan pada upaya untuk tetap memelihara tradisi budaya baik dalam kultur, agama kebiasaan dan identitas nasional.dalam societal security pemerintah Hungaria membuat kuisisioner untuk mengiring opini public masyarakat Hungaria untuk

menolak adanya tentang pengungsi karna ditakutkan akan mengeser serta tradisi ataupun budaya asli dari Hungaria.

4. Economic security, memfokuskan pada upaya unruk memelihara pada sumber daya, keuangan sera pasar guna untuk menjaga tingkat kemakmuran serta power suatu Negara.

C.METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah study literature yang dicoba dengan mencari rujukan teori yang relevan dengan permasalahan ataupun kasus yang ditemukan. Rujukan teori dengan penelitian study literature dijadikan untuk praktek riset dilapangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dengan memakai tata cara penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis-interprentative.yaitu dengan cara menggumpulkan berbagai data serta informasi yang diperoleh untuk

menganalisis serta menginterpretasikan data terkait dengan kebijakan sekuritisasi pemerintah Hungaria dalam upaya mencegah meningkatnya arus pengungsi dari Timur Tengah yang melalui

2. Unit Analisa dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Hungaria dalam melakukan upaya mencegah pengungsi ke Hungaria. Objek penelitian ini adalah kebijakan sekuritisasi pemerintah Hungaria dalam mencegah arus pengungsi dari Timur tengah yang melalui wilayah perbatasan Hungaria.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan informasi dan data yang cocok. Sehingga, dalam mengumpulkan data serta informasi tersebut peneliti menggunakan teknik riset kepustakaan. Riset tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi literatur baik

offline maupun online yang meliputi buku, dokumen, jurnal, artikel serta makalah-makalah yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam teknis analisa data, peneliti akan melakukan terlebih dahulu seperti mencari-cari data dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hungaria, kemudian peneliti akan melakukan reduksi data, yaitu dengan cara memilih serta merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dengan teks naratif, hal tersebut dilakukan agar data yang sudah didapat mudah untuk dipahami, kemudian peneliti menerapkan teori yang ada di pustaka terhadap data yang telah disajikan. Tahap akhirnya adalah peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah diteliti.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pembangunan Perbatasan Hungaria-Serbia

Pada 17 Juni 2015, PM Orban mengumumkan bahwa pembangunan pagar sepanjang 175 kilometer dan senilai 106 juta dollar akan dibangun di perbatasan Hungaria dengan Serbia. Hal ini dikarenakan pada bulan yang sama, permohonan suaka bisa mencapai 1000 orang per harinya.100 Konstruksi pagar tersebut dimulai pada 13 Juli. Pagar tersebut memiliki empat jenis pagar yang berbeda. Selain itu, di pagar tersebut juga dipasang kawat yang panjangnya sama dengan pagar. Namun ternyata pemasangan kawat ini dinilai kurang efektif karena kawat tersebut masih mudah untuk dipotong atau bahkan diangkat. Pada akhirnya, pagar tersebut dibangun dengan baja dan dipasang gulungan kawat berduri di bagian atas dan bawah pagar. Sebanyak 900 tentara dari Hungarian Army memulai konstruksi pembangunan pagar ini. Bahan yang digunakan untuk membangun pagar tersebut disediakan oleh Hungarian Prison Service, karena para narapidana di penjara Hungaria memproduksi bahan-bahan bangunan. Sebanyak hampir 30 juta Euro dialokasikan untuk memulai pembangunan pagar ini.

A. Amandemen Undang-Undang Baru Tentang Pengungsi

*Monika dwijayanti E111161034
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan*

Pada Januari 2015, partai Fidesz meminta pemerintah Hungaria untuk memperketat hukum yang mengatur pengungsi. Hanya satu hukum yang mengatur tentang pengungsi (Act LXXX of 2007 on Asylum) yang diamandemen oleh Parlemen Hungaria pada 6 bulan pertama di tahun 2015

B. Billboard Tentang Pengungsi

Menurut Orban, (masyarakat Hungaria) tidak ingin adanya keberadaan minoritas dengan karakteristik budaya dan latar belakang yang berbeda dengan kami. Kami ingin menjaga Hungaria sebagai Hungaria. Kemudian di hari berikutnya, pemimpin parlementer partai Fidesz, menyatakan bahwa kelompok Muslim di Hungaria mengganggu stabilitas tatanan internal Kristen Eropa di Eropa Barat dan bahwa masalah penerimaan imigran ekonomi yang latar belakangnya benar-benar berbeda dari Hungaria tersebut di luar kepentingan Hungaria.(Reteman,2015).

C. Hungaria Menyiagakan Militer & Polisi

Sejak 7 Juli 2016, pengungsi yang tidak memiliki dokumen yang jelas seperti perizinan untuk menjadikan Hungaria sebagai suaka, ditangkap dan dikembalikan keluar dari pagar perbatasan. Menurut otoritas Hungaria, para pencari suaka ini tidak dikeluarkan, karena walaupun mereka keluar dari pagar perbatasan tersebut, tetapi mereka masih berada di teritori Hungaria. Pagar perbatasan tersebut diawasi 24 jam oleh tentara dan polisi Hungaria. Karena polisi pada umumnya tidak dilatih untuk mengawasi perbatasan, maka pada Agustus 2016, pasukan polisi mulai merekrut dan melatih *Border Hunters*. Sangat disayangkan *Border Hunters* tersebut pada akhirnya tidak sepenuhnya berjalan karena para calon *Border Hunters* tersebut tidak memenuhi kualifikasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hungaria menyakini jika para pengungsi serta pencari suaka tersebut yang sebagian besar berasal dari kawasan timur tengah dengan latar balik budaya arab serta pemeluk agama islam hendak susah berintegrasi dengan budaya Eropa serta Hungaria secara spesialnya yang sudah hidup sepanjang ribuan tahun dengan budaya Eropa yang berbasis

Monika dwijayanti E1111161034
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan

Christianity. Para pengungsi tersebut diyakini cuma hendak mengancam kehidupan serta bukti diri diri dalam bangsa Hungaria serta Eropa baik secara budaya, nilai serta norma pula secara ekonomi dimana pengungsi dikira hendak mengambil lapangan kerja dalam negeri mereka apalagi dikira selaku cikal bakal ancaman kebijakan- kebijakan yang diambil oleh Hungaria dalam mengalami arus pengungsi serta migran dari Timur Tengah dilandasi oleh realisme ialah terpaut upaya buat mempertahankan serta melindungi kepentingan nasionalnya. Merujuk pada kepentingan nasional yang dikemukakan oleh K. J Holsti, Hungaria berupaya buat mempertahankan serta melindungi kepentingan nasional vital(core value) yang terpaut dengan ancaman terorisme serta kejahatan transnasional dan akses ekonomi, jangka menengah(middle range objective) terpaut dengan upaya buat mengukuhkan eksisten negeri dikala berhadapan dengan UE selaku organisasi internasional serta kepentingan nasional

jangka panjang(long range goals) terpaut dengan pencapaian bukti diri negeri Kristen baik dalam tataran dalam negeri ataupun internasional/ regional. Dengan demikian hingga penolakan pengungsi serta migran yang dicoba oleh Hungaria ialah gambaran dari perilaku negeri yang didasarkan pada realisme.

2. Saran

1. Uni Eropa selaku organisasi regional yang menaungi Hungaria serta Negaranegara Eropa yang lain wajib sanggup meyakinkan pemerintah Hungaria kalau tidaklah ancaman untuk Hungaria baik selaku ancaman untuk identitas Hungaria maupun selaku ancaman untuk keselamatan masyarakatnya serta warga Eropa secara biasanya. Uni Eropa musti sanggup menjamin apabila Hungaria berkenan buat membuka Negeranya selaku jalan masuk pengungsi serta pencari suaka ke dalam Eropa serta sediakan tempat transit yang layak untuk para pengungsi tersebut hingga perihal tersebut tidak

hendak bawa ketakutan Hungaria sepanjang ini kepada realitas.

2. Selaku satu kesatuan dalam Uni Eropa telah sepatutnya terdapat kesatuan pemikiran dalam merespon fenomena krisis pengungsi Eropa tersebut sehingga jalur keluar dan pemecahan bisa lebih gampang buat didapatkan dan direalisasikan secara merata serta bukannya memunculkan konflik baru. Berarti untuk para Negeri anggota Uni Eropa buat mengadakan konsolidasi politik buat menyatukan pemikiran menimpa urgensi serta berartinya buat menciptakan pemecahan bersama dalam menanggulangi krisis pengungsi serta diatas segalanya membagikan pertolongan untuk para pengungsi serta pencari suaka tersebut. Konsolidasi politik buat menyatukan pemikiran ini pula berarti sehingga segala anggota UE paham“ indahny” sharing burden antara Negara-negara anggota Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Buzan Barry, 1991. *People, State and Fear: An Agenda For International Security Studies in the post-Cold war Era*. London: Harvester Wheatsheaf Publisher
- Buzan Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1999. *Security: A New Framework For analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher
- Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner. 1998. hal. 24
- Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner. 1998.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Jackson Robert, Georg Sorenson 2013. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Pustaka Pelajar
- BBC. *United States Country Profile*. <https://www.bbc.com/news/world-us-hungaria-16761057>. (Diakses pada Tanggal 21 januari 2018)
- Encyclopedia Britanica, Constitution of the united State*. <https://www.britanica.com/topic/constitution-of-the-united>. diakses pada tanggal 28 Juli
- Eurostat, Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015, Eurostat, Maret 2016, diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/document/s/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6> pada 3 Mei 2019
- Government Publishing office. www.usgovernmental.gov/ (Diakses pada Tanggal 28 Juli 2019) (www.uhm.ic.id diakses pada tanggal 22 januari 2019).
- Ilmu Pengetahuan Umum. Negara Hungaria. <https://ilmupengetahuanumum.com> (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019)
- Ahmad. 2018. *Analisa Kebijakan Hungaria Dalam Menolak Menerima Pengungsi Asal Suriah Malang*. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/39194/>
- BBC. *United States Country Profile*. <https://www.bbc.com/news/world-us-hungaria-16761057>